

# Hukum Sebagai Sistem Norma

Oleh

Arga Baskara

## Abstrak

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika perkembangan kehidupan manusia.

**Kata Kunci: Hukum, Sistem Norma**

### A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk menjalankan kehidupan. Manusia mengembangkan sarana bersifat immateril yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih dan kebersamaan, bahkan dua hal itulah yang menlandasi kehidupan bermasyarakat yang disebut sebagai moral. Dengan begini, moral menimbulkan pranata-pranata pada manusia.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Secara harfiah, norma berarti aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum. Maka secara umum, Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya.<sup>2</sup>

Aturan-aturan tersebutlah yang menjadi acuan seseorang individu, untuk mengarahkan bagaimana dia bertingkah laku dan bersikap. Tetapi, kemudian bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan atau tingkah laku tersebut sehingga bisa dikatakan sebuah norma itu telah sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan demikian, disinilah norma terbagi –bagi dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain adalah Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Liberty, Yohyakarta, 2002, hal. 1

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, hal. 18.

Pada masyarakat primitif, kebiasaan diidentikkan dengan hukum. Sebagai norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya yang hadir pada masyarakat dengan budaya apa pun. Malinowski menegaskan pada suatu masyarakat primitif, hukum timbul dari kebutuhan masyarakat. Hukum bereksistensi sebagai hasil kerja sama suatu masyarakat, dimana merupakan modus survival bagi manusia, hukum merupakan sesuatu yang inheren dengan kehidupan masyarakat.

Slogan-slogan *Ubi Sociates Ibi Ius, Fiat Iustitia Ruat Caelum*, dan lain-lainya menegaskan bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas.

Hukum tidak sama dengan kebiasaan. Jika hukum hadir pada masyarakat dalam bentuk budaya apapun dan inheren dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan itu sesuatu yang acap kali dilakukan berulang-ulang yang dapat berupa ritual penting, menimbulkan reaksi bila terjadi pelanggaran, dan kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila masyarakat menerima sebagai aturan yang harus dilakukan.

## B. Pembahasan

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil(*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum. Menurut Paul Scholten, asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>4</sup>

Hukum dan norma-norma sosial lainnya dibedakan dari berbagai segiantara lain dari segi tujuan adanya norma, hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriyah manusia. Norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus survival. Dari segi wilayah yang diaturnya, hukum mengatur tingkah laku lahiriyah manusia. Oleh karena itu, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dari segi asal kekuatan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Hukum Kencana*, Jakarta, 2013, hal. 1

<sup>4</sup> J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa : B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 119.

mengikatnya, hukum mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau berkembang dari praktik-praktik yang berkembang di masyarakat. Hukum menitikberatkan kepada aspek manusia sebagai makhluk sosial sekaligus aspek lahiriyah manusia. Dari segi isi norma, menetapkan hak disamping kewajiban dan mencerminkan moral yang mendasari segala aktivitas. Norma agama cenderung memiliki kekuatan yang mengikat yang berasal dari dalam diri tiap individu. Ketaatan itu terbentuk karena iman. Titik berat yang menjadi sasaran norma agama adalah aspek individu manusia bukan aspek manusia sebagai makhluk sosial. Agar manusia lebih berkenan kepada Sang Pencipta bukan ketertiban masyarakat. Dimana semua yang dianjurkan, dilarang, dan dijanjikan Tuhan tiap agama ada dalam Kitab Suci masing-masing agama. Moral, Moral hadir sebagai petunjuk sebagai individu. Sebagai suatu produk budaya yang melekat pada diri manusia moral menghendaki manusia berbudi pekerti luhur dan berbuat kebajikan. Dalam hal demikian, secara jelas moral dapat dibedakan dari hukum. Hukum tidak pernah menuntut orang berbuat kebajikan atau demawan. Yang pertama kali membuat perbedaan yang tegas antara hukum dan moral adalah Immanuel Kant. Menurut M.L.J. Van Apeldoorn menyatakan, bahwa perbedaan antara hukum dan moral tidak perlu dipertajam karena tidak sepenuhnya benar kalau hukum berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah manusia dan moral hanya berkenaan dengan keadaan batiniah seseorang. Moral didalam perbincangan ini harus berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah manusia dalam rangka hidup manusia. Jika hukum memang ingin melarang perzinahan atau hal-hal tidak bermoral lainnya, pesan-pesan itu harus dapat diterima oleh nalar dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Jika agama dan moral lebih menitikberatkan kepada aspek manusia sebagai individu dan aspek batiniah manusia, etika tingkahlaku sebagaimana hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriyah manusia. Namun demikian antara hukum dan etika tingkahlaku terdapat juga perbedaan. Dalam pelaksanaan suatu norma karena adanya daya laku, dihadapkan pula pada daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna secara efektif atau tidak. Dalam hal ini dapat pula terjadi bahwa, suatu ketentuan dalam sebuah perundang-undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berdaya laku (karena belum dicabut). Hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi tidak dengan melakukan pencebutan terhadap ketentuan yang diubah tersebut.

Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Contoh, Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Undang-undang merupakan produk hukum ciptaan DPR dan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah yang memiliki fungsi menjalankan perintah undang-undang. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar.

Istilah Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia.

Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia, adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang *sedang berlaku* di Indonesia. Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsure-unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

### **C. Penutup**

Secara sifat norma hukum datang dari luar seseorang (misalnya oleh negara) yang berfungsi mengatur dan memiliki sanksi yang memaksa yang dapat langsung diterapkan (oleh aparat negara). Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertindak sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika perkembangan kehidupan manusia.

### **Daftar Pustaka**

Sudikno Mertokusumo. 2002. Mengenal Hukum, Liberty: Yogyakarta

Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius: Yogyakarta.

Munir Fuady. 2013. Teori-Teori Dalam Hukum Kencana: Jakarta

J.J.H. Bruggink. 1999. Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa : B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti: Bandung